

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada 16 Agustus 2019 tepatnya dalam Pidato Kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Presiden Joko Widodo meminta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Presiden Jokowi menjelaskan akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, namun belum menentukan lokasi spesifik karena masih dalam tahap kajian dan Presiden menegaskan bahwa pemilihan lokasi IKN ini harus mempertimbangkan dari segi bencana, air, perekonomian, demografi, sosial politik dan pertahanan keamanan (Nurita 2019)

Pasca kemerdekaan, Indonesia tercatat dua kali melakukan pemindahan ibu kota negaranya. Indonesia terpaksa memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta tepat 4 Januari 1946, hal ini disebabkan kondisi keamanan di Jakarta semakin buruk dengan aksi teror dan militer belanda yang dipimpin oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) (Saptadi 2017, 205). Namun ibu kota negara di Yogyakarta hanya bertahan selama 2 tahun karena Yogyakarta kembali diserang oleh pasukan militer Belanda, kejadian tersebut membuat Soekarno dan Hatta diasingkan diluar Pulau Jawa (Saptadi 2017, 210).

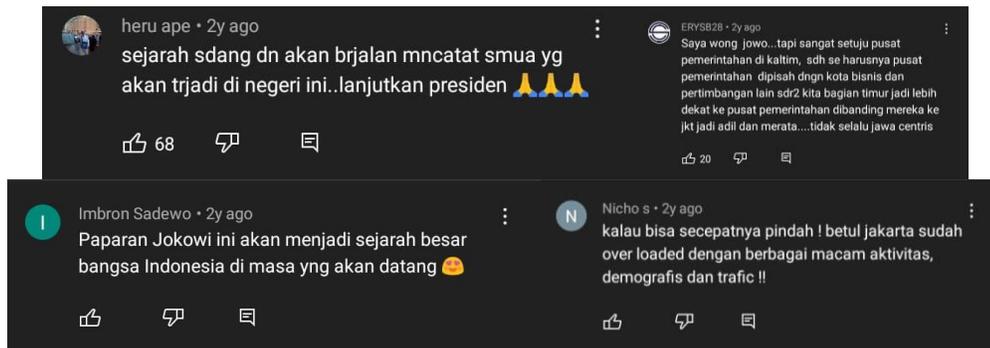
Setelah kejadian yang disebabkan oleh pasukan militer Belanda membuat ibu kota negara kembali dipindahkan ke Bukittinggi pada 19 Desember 1948 yang disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Bersifat darurat ibu kota negara di Bukittinggi tidak berlangsung lama dan ibu kota negara Indonesia kembali dipindahkan ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 setelah Soekarno dan Hatta kembali dari perasingan disertai dengan pembubaran PDRI. Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk pada 17 Desember 1949, satu tahun

kemudian RIS dibubarkan dan ibu kota negara Indonesia kembali ke Jakarta secara *de facto* dan diakui secara *de jure* pada 28 Agustus 1961. (Adryamarthanino 2022)

Tahun 1950-an setelah kembalinya ibu kota negara ke Jakarta Soekarno sempat memiliki niatan untuk kembali memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan tepatnya di Palangkaraya. Niatan ini muncul saat Soekarno meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan melihat ada potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai ibu kota, namun disisi lain ia juga beranggapan bahwa Jakarta memiliki sejarah yang panjang guna menumbuhkan identitas nasionalisme dan monumental bersejarah Indonesia dalam memperjuangkan pengibaran bendera merah putih dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga wacana pemindahan ibu kota negara tidak dilanjutkan (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 2).

Ditahun 2019 Presiden Jokowi juga menjadikan Pulau Kalimantan sebagai lokasi yang akan dipindah sebagai ibu kota negara baru dan pada Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019 menyebutkan bahwa Ibu Kota Negara secara resmi akan dipindahkan ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.





Gambar 1. 1: Pemaknaan Khalayak dalam dalam kolom komentar Youtube Sekretariat Presiden

Sumber: Youtube Sekretariat Presiden. *Presiden Jokowi Mengumumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Istana Negara 26 Agustus 2019.*

Gambar di atas merupakan beberapa komentar yang dituliskan oleh pengguna media sosial Youtube mengenai bagaimana pemaknaan mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam unggahan video tersebut mendapatkan 251 komentar dan mayoritas menyetujui mengenai pemindahan ibu kota negara dan ada pula yang memberikan komentar bahwa pemindahan ibu kota negara ini ialah bentuk pengamalan dari sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditahun 2014 Andrinof Chaniago, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014 – 2015 ini melakukan kajian awal secara mandiri mengenai ibu kota negara baru. Andrinof menegaskan pemindahan ibu kota negara dinilai dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang rutin terjadi seperti banjir, kemacetan, kesukesan air bersih, pemindahan ini akan menyelamatkan Jakarta, menyelamatkan Jabodetabek dan menyelamatkan Pulau Jawa karena Pulau Jawa sudah over populasi, jumlah penduduknya terhadap rasio wilayah daerah sudah tidak seimbang. (Rasyid 2020). Berkaitan dengan penjelasan yang diberikan oleh Andrinof, pemindahan ibu kota negara juga memiliki alasan sebagai berikut:

#### 1. Penduduk Jawa Terlalu Padat

Melihat data Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) pada 2019 menunjukkan bahwa 56,9 persen atau setara dengan 150,18 juta jiwa penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Kalimantan terbilang masih minim penduduk dengan 6,1 persen atau setara dengan 16,23 juta. (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 1).

#### 2. Kontribusi Ekonomi Pulau Jawa Terhadap PDB Nasional

Guna untuk pemerataan perekonomian, pada nyatanya selama ini tingkat pertumbuhan perekonomian dengan kontribusi PDB Nasional terfokus di Pulau Jawa dengan 59 persen sedangkan Pulau lainnya masih dibawah seperti Kalimantan kontribusi ekonomi hanya 8,05 persen terhadap PDB (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 1).

#### 3. Krisis Ketersediaan Air Bersih

Krisis air bersih sedang menghantui Pulau Jawa dan berdasarkan pemaparan data Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, menunjukkkn kondisi paling parah berada di Jabodetabek dan Jawa Timur. (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 2).

#### 4. Konversi Lahan Terbesar

Proporsi lahan produktif didominasi di Pulau Jawa bahkan mencapai 5 kali lipat dari pulau kalimantan dan diprediksikan pada tahun 2030 akan terjadi pembangunan lahan sebesar 42,79 persen dan kalimantan 11,08 persen. (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 2).

#### 5. Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi

Jakarta masuk ke dalam kategori Kota terpadat didunia dan berdasarkan hasil dari WEF 2017 menunjukkan bahwa Jakarta berada pada peringkat ke-9. (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 3).

#### 6. Penurunan Daya Dukung Lingkungan Jakarta

Menurunnya daya dukung lingkungan Jakarta dengan 57 persen air waduh tercemar berat, 61 persen air sungai tercemar berat, diprediksikan akan

terjadi kenaikan muka air laun mencapai 25 - 50 cm di tahun 2050 sertanya muka air tanah turun mencapai 7,5 – 10 cm dalam setahun. (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 4).

#### 7. Ancaman alam

DKI Jakarta rentan bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah turun di Jakarta. Sedangkan lokasi IKN Nusantara cenderung lebih aman dari bencana alam (Kementrian PPN/Bappenas 2021, 4).

Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Manda & Adi yang berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT” berdasarkan hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threat*). Dari segi Strengths (kekuatan), ketersediaan air, pertumbuhan urbanisasi, daya dukung lingkungan, ketersediaan infrastruktur, kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Jawa semuanya sudah medominasi dan dengan dipindahkannya ke Kalimantan Timur akan terjadi penyesuaian kehidupan yang baru yang lebih baik dan terjadi pemerataan pertumbuhan perekonomian. Dalam segi *Weaknesses* (kelemahan), terdapat pada alokasi anggaran yang sangat besar untuk pembangunan IKN sehingga akan ada penurunan belanja dan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta namun kegiatan tersebut akan stabil kembali setelah resmi berpindah ibu kota negara. Di samping itu didukung dari segi *Opportunities* (peluang) akan membuat peluang baru bagi pelaku yang hendak berinvestasi di Kalimantan Timur, meningkatnya potensi lapangan kerja, menciptakan sumber ekonomi baru, berpotensi untuk melakukan perdagangan antar wilayah, pembangunan kota dirancang dengan sistem, pemanfaatan energi baru. Serta dari segi *Threats* (ancaman) bentuk ancaman akan muncul dari geostrategis dari 3 sisi yaitu sisi darat, sisi laut dan sisi udara. Sisi darat, memperlihatkan lokasi IKN Nusantara bersisian dengan perbatasan darat ke Malaysia sejauh 2.062 km sehingga bisa menjadi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Sisi laut, berhimpitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II

dan *choke point* atau titik sempit dunia serta dari sisi udara lokasi IKN mendekati *Flight Information Regional (FIR)* milik Singapura, Malaysia dan Filipina (Saraswati, Manda and Adi 2022, 4048 - 4051)

Pemindahan ibu kota negara diumumkan sebelum adanya pandemi covid-19, sehingga program tersebut diberhentikan sejenak dan pemerintah fokus mengurus permasalahan covid-19. Selama pandemi covid-19 pemberitaan mengenai pemindahan ibu kota negara meredup, namun setelah hampir 3 tahun dengan menurunnya angka terpapar dan kematian yang diakibatkan oleh covid-19 membuat pemerintah kembali menyoroiti permasalahan pemindahan ibu kota negara. Presiden sudah mengumumkan secara resmi akan memindahkan ibu kota negara namun untuk memperkuat dasar tersebut terbentuklah UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

*“Pada pasal 1 ayat (1): Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia,*

*Pasal 1 ayat (2): Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebutkan sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”*

Selain itu pemindahan ibu kota negara menjadi perbincangan yang mendatangkan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Presiden Joko Widodo menegaskan dengan dilakukannya pemindahan ibu kota negara ialah untuk menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, dengan mencerminkan identitas nasional menjadi keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, mewujudkan kota hutan, *smart city*, modern dan berkelanjutan serta memiliki standar Internasional (Ciputra 2022).

Setelah pengumuman lokasi dan terciptanya UU terkait IKN Nusantara ini, pemerintah juga menggelar prosesi ritual penyatuan tanah dan air. Prosesi ritual merupakan awalan simbolis dari pembangunan IKN Nusantara. Presiden Joko

Widodo mengundang Gubernur dari 34 Provinsi dan mengikut sertakan 15 tokoh adat dari Kalimantan Timur untuk menyatukan tanah dan air di titik nol IKN Nusantara. Setiap Gubernur diwajibkan membawa dua kg tanah dan satu liter air. Gubernur secara bergilir menyerahkan tanah dan air kepada Presiden, kemudian tanah dan air tersebut dituangkan ke dalam kendi besar yang dinamai Kendi Nusantara yang melambangkan kesatuan atau kebinekaan Indonesia untuk membangun Nusantara (Farisa 2022).

Selain itu juga prosesi ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, TNI/Polri, Swasta dan masyarakat yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Prosesi penyatuan tanah dan air bukan merupakan ritual syirik, mistik dan primitif melainkan bentuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap tradisi budaya bangsa yang beragam dan diakui dan dihormat dalam UUD 1945. Ada pula tujuan dari prosesi ini diyakini sebagai doa dan memohon kepada Allah SWT agar program pembangunan IKN Nusantara bisa berjalan dengan baik (Farisa 2022).

Dikutip dari beritasatu.com, 14 Maret 2022 Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merasa terharu dengan prosesi penyatuan tanah, “saya sebagai Gubernur Kaltim sangat terharu dan bangga, pada hari ini seluruh Gubernur kumpul menyatukan tanah dan air yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ini sebuah sejarah yang menurut saya tidak ada di dunia, baru kali ini terjadi di Republik Indonesia Khususnya di Kalimantan Timur di tempat Ibu Kota Nusantara ini” ujar Isran Noor.

Idealnya pemindahan ibu kota negara bertujuan baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia, namun dalam praktiknya semua yang direncanakan pasti akan menuai pro dan kontra. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadhoni, dkk mengenai “Opini Masyarakat Mengenai Pemindahan Ibu kota Ke Kalimantan Timur” survei tersebut dilakukan di Surabaya dengan 350 responden. Diketahui hasil 99 persen responden mengetahui tentang pemindahan ibu kota negara.

Sebanyak 45 persen responden setuju dengan pemindahan ibu kota negara, karena melihat DKI Jakarta yang sudah padat penduduk dan responden berharap dapat mempermudah proses pemerataan di Indonesia, dengan Jakarta sebagai ibu kota negara memberikan kesenjangan bagi daerah-daerah lainnya dimana perekonomian, pembangunan mendominasi di Pulau Jawa saja atau disebut dengan Java Sentris. Kemudian diketahui bahwa 21 persen masyarakat memilih biasa saja mengenai pemindahan ibu kota negara dan sisanya yaitu yaitu 34 persen tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Walaupun secara persentasi masyarakat yang setuju lebih besar daripada masyarakat yang tidak setuju, namun pada kenyataannya bahwa terdapat 56 persen responden beranggapan pemerintah belum maksimal dalam kebijakan tersebut, hal ini karena beberapa bulan terakhir pemerintah kurang terbuka terutama tidak adanya sosialisasi secara terbuka oleh pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Dalam pertanyaan mengenai saran sebanyak 43 persen reponden berharap pemerintah meminimalisir dampak negatif dari pemindahan ibu kota dengan menjaga kelestarian hutan di Kalimantan, karena lingkungan menjadi masalah krusial sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur, lalu 7 persen responden memberikan saran untuk mempermudah akses menuju ibu kota. Kemudian 23 persen responden memberikan saran untuk merealisasikan pemerataan di seluruh Indonesia, dan 24 persen responden masyarakat menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih dahulu, dan 3 persen responden tidak memberikan saran apapun (Romadhoni, Ula and Mayangsari 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romdhani dkk diketahui bahwa 45 persen masyarakat Surabaya menyetujui adanya pemindahan ibu kota negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 34 persen responden tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota negara dan didukung dengan alasan dari 56 persen responden menyatakan bahwa pemerintah dinilai belum maksimal dalam membuat kebijakan dan pemerintah juga dianggap kurang terbuka serta tidak dilakukannya sosialisasi mengenai pemindahan ibu kota negara.

Kemudian Pusat Kajian Kepemudaan (PUSKAMUDA) Januari 2022 melakukan survei terhadap warga Jabdetabek dengan 500 responden. 58, 8 persen warga menolak pemindahan ibu kota negara, karena memandang nilai historis Jakarta sebagai ibu kota negara dan dengan adanya IKN Nusantara akan merusak lingkungan di Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia serta membebani APBN dan keputusan dinilai gegabah, mereka juga merasa bukan ASN sehingga tidak memiliki keharusan untuk pindah ke Kalimantan Timur. Namun tidak menutup kemungkinan ada 29 persen responden memilih setuju karena dengan adanya pemindahan ini dapat memperbaiki kualitas lingkungan di Jakarta dan adanya pemerataan perekonomian, serta terciptanya peluang bisnis yang baru serta lingkungan hidup yang lebih tertata.

Masyarakat Surabaya dan Jabodetabek memberikan beberapa pengecualian dan penolakan atas pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena dinilai terlalu tergesa-gesa, selain itu pemindahan ibu kota negara harus diperhitungkan dengan kajian yang maksimal guna terealisasi sehingga dapat menghindari kerusakan ekosistem yang ada di Kalimantan Timur. Maka sejauh ini pemindahan IKN ke Kalimantan Timur masih menjadi pembahasan yang pro dan kontra. Namun bagaimana dengan pendapat masyarakat yang berada di pulau Kalimantan lainnya, kita ketahui bahwa Kalimantan memiliki 5 bagian yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Masih dalam satu pulau, tidak menutup kemungkinan akan adanya kedekatan homofili yang terlihat dalam bentuk derajat kesamaan seperti keyakinan, nilai-nilai, pendidikan, status sosial dan lainnya (Rogers and Kincaid 1981, 127). Melihat dari lokasinya, Kalimantan Barat memiliki 3 border PLBN (pos lintas batas negara) yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, yang menjadi pusat penghubung Indonesia dengan Malaysia, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Manda & Adi yang berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT” menunjukkan bahwa perbatasan dengan darat

dan Malaysia akan mendatangkan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan dari sisi darat.



Gambar 1. 2 Peta Pulau Kalimantan

Keterangan:

1 PLBN Aruk

(Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

2 PLBN Entikong

(Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)

3 PLBN Nanga Badau

(Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)

4 Pelabuhan Internasional Kijing

(Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat)

Selain memiliki 3 pos lintas batas negara, Kalimantan Barat juga memiliki pelabuhan internasional Kijing yang merupakan pelabuhan internasional terbesar di Pulau Kalimantan, dengan adanya pelabuhan internasional yang baru diresmikan pada 9 Agustus 2022 oleh Presiden Joko Widodo ini, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal guna memperkuat daya saing dan memperbaiki konektivitas antar pelabuhan, antar pulau dan antar negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gubernur Sutarmidji bahwa “dengan pemindahan ibu kota ini, Kalbar jelasakan menjadi daerah paling berdampak besar, di mana pun ibu kota negara itu berada nantinya. Hal ini dikarenakan, Kalbar memiliki pelabuhan internasional Kijing yang tentunya menjadi salah satu pendukung arus keluar masuk barang bagi ibu kota negara baru nantinya” (Silaban 2019).

## 1.2. Rumusan Masalah

Beberapa tanggapan masyarakat yang terlihat dari hasil penelitian terdahulu dan survei menunjukkan penolakan dan pertimbangan terkait pemindahan ibu kota negara. Fenomena pemindahan ibu kota negara menjadi pembicaraan hangat yang tidak ada habisnya, muncul tanggapan pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa dari masyarakat beranggapan pemindahan ibu kota akan merusak lingkungan Pulau Kalimantan padahal pemerintah memiliki niatan yang baik ialah untuk pemerataan perekonomian sehingga akan meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia.

Masyarakat masih belum mengerti maksud dari tujuan dan kebijakan pemerintah, mereka hanya berfokus kepada keberlangsungan hidup mereka dan keberlangsungan lingkungan sekitar. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa pemindahan ibu kota negara hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak memperdulikan hakikat hidup masyarakat banyak. Sehingga masyarakat hanya melihat dari satu sudut pandang bahwa pemindahan ini hanya akan membuat mereka

mengalami kesusahan dan penderitaan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat Kalimantan Barat memberikan pemaknaan yang sama dengan hasil penelitian terdahulu dan survei atau malah sebaliknya, dengan begitu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan masyarakat Kalimantan Barat terhadap proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur?
  - a. Pemaknaan terhadap pemindahan ibu kota negara
  - b. Pemaknaan terhadap lokasi ibu kota negara
  - c. Pemaknaan terhadap dampak negatif dan positif
  - d. Pemaknaan terhadap prosesi ritual penyatuan tanah dan air

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan masyarakat Kalimantan Barat terhadap proses pemindahan ibu kota negara yang mana sejauh ini masih mendatangkan pro dan kontra dari sebagian kalangan masyarakat Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan referensi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan teori resepsi dan diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk kajian ilmu komunikasi dalam memahami pemaknaan dari masyarakat mengenai proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi pemerintah dalam membuat sebuah keputusan mengenai pemindahan ibu kota negara.

#### 1.4.3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian diharapkan mampu menjelaskan suatu fenomena proses pemindahan ibu kota negara yang terjadi di tengah masyarakat dan bisa di jadikan sebagai gambaran untuk memaknai bagaimana maksud dan tujuan dari pemindahan ibu kota negara.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

##### Bab I: Pendahuluan

Menjabarkan fenomena yang sedang peneliti teliti menggunakan data - data empiris serta menampilkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab 1 juga memuat perumusan masalah yang akan di teliti, tujuan penelitian, manfaat penelitaian serta sistematikan penelitian dari Bab 1 sampai Bab 5.

##### Bab II: Tinjauan Pustaka

Tinjau Pustaka terdiri dari landasan konsep pemaknaan masyarakat, konsep pemindahan ibu kota negara, konsep prosesi ritual penyatuan tanah dan air dan teori resepsi, lalu kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Kerangka teoritis berisikan teori yang peneliti gunakan, dan kerangka berpikir berisikan pemikiran yang disusun menggunakan bagan kerangka berpikir.

##### Bab III: Metodologi Penelitian

Terdiri atas paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi data dan keabsahan data.

#### Bab IV: Pembahasan

Berisi penyajian pembahasan berisi temuan data yang didapat dari wawancara dan *coding*, terakhir adanya interpretasi data mengenai pokok-pokok temuan penelitian dengan mempergunakan kerangka teoritis yang telah dibuat sebagai lensa sehingga didapat pengetahuan dan pembahasan yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

#### Bab V: Penutup

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan analisis dan penjabaran singkat mengenai permasalahan penelitian yang dijabarkan di pada bab-bab sebelumnya.